



Pemkot Nilai VHO Tak Dongkrak PAD

■ Diduga Tak Setor Pajak

■ Moratorium Hotel Diperpanjang

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menilai maraknya keberadaan VHO (Virtual Hotel Operation) di kawasan setempat tidak serta merta ikut mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot setempat menduga VHO tidak membayarkan kewajibannya berupa pajak kepada Pemkot.

Pemkot juga menilai VHO abai persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta tidak memberlakukan standarisasi yang jelas terhadap keamanan konsumen. "Kami akan memberikan regulasi terkait hal itu untuk melindungi konsumen. Dasarnya nanti IMB," kata Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Senin (13/1).

Kami akan memberikan regulasi terkait hal itu untuk melindungi konsumen. Dasarnya nanti IMB.

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta

● ke halaman 15

- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menilai maraknya VHO (Virtual Hotel Operation) tak mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
- Diduga VHO tidak membayarkan kewajibannya berupa pajak kepada Pemkot.
- Pemkot juga menilai VHO abai persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta tidak memberlakukan standarisasi yang jelas terhadap keamanan konsumen.
- Pemkot Yogyakarta juga memperpanjang keputusan moratorium hotel selama satu tahun ini dengan memperbarui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2019.
- Aturan tersebut dikecualikan bagi pengembangan hotel yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebelumnya, pembangunan hotel bintang empat dan lima, pembangunan pengembangan fasilitas stasiun Tugu, dan perubahan fungsi bangunan menjadi bangunan untuk usaha akomodasi selain hotel, seperti guest house atau home stay.

Pemkot Nilai VHO Tak Dongkrak PAD

• Sambungan Hal 9

Haryadi mengatakan, tentunya perlu regulasi yang jelas untuk mengatur pengalihan fungsi bangunan yang semula digunakan untuk pondokan atau indekos menjadi hunian hotel. Selama ini, ada dugaan pemilik indekos dan juga pondokan mengalihkan fungsi bangunan menjadi hunian hotel namun tidak mengurus perizinan sesuai dengan fungsinya.

"Aturannya memang tidak seperti itu. Kalau itu tidak ada aturannya akan kita buat, terutama buat konsumen," imbuhnya.

Menurut Haryadi, kadangkala para tamu VHO bisa dimungkinkan tidak melakukan laporan saat masuk maupun keluar. Sehingga

jika terdapat kejadian yang tidak diinginkan berdampak pada konsumen itu sendiri.

Haryadi berharap VHO disamakan dengan unit bisnis hotel lainnya, sehingga bisa mempunyai operasional sistem yang jelas dan dapat mendongkrak PAD Kota Yogya.

Perpanjang Moratorium

Pemkot Yogya juga memutuskan untuk memperpanjang keputusan moratorium hotel selama satu tahun ini dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2019. Menurut Haryadi, kebijakan itu ditempuh guna menjaga perkembangan industri perhotelan di Yogyakarta tetap kondusif. Termasuk, untuk kepentingan konsolidasi lingkungan.

Hanya saja, aturan tersebut dikecualikan bagi pengembangan hotel yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebe-

lumnya, pembangunan hotel bintang empat dan lima, pembangunan pengembangan fasilitas stasiun Tugu, dan perubahan fungsi bangunan menjadi bangunan untuk usaha akomodasi selain hotel, seperti *guest house* atau *home stay*.

"Aturan tetap sama dengan Perwal sebelumnya hanya waktunya saja yang diperpanjang," kata dia.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya, Ipung Purwandari meminta Pemkot untuk segera mengeluarkan aturan yang jelas tentang VHO. Selain menyoroti dari sisi aturan Ipung juga mengkritisi potensi pajak dari VHO itu.

Dengan maraknya VHO diharapkan bisa meningkatkan PAD. Namun hal itu dinilai belum terwujud. "Pemkot harus tertibkan, agar haknya sama tentang pajak dan lain lain," ujar Ipung. (jsf)

PHRI Tak Punya Data Valid

KETUA Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo mengatakan, pihaknya belum mempunyai data yang valid berapa jumlah VHO yang telah beroperasi di seluruh DIY. Pihaknya pun akan memben-

tuk Pokja yang bakal membuat regulasi dan juga aturan lainnya bagi VHO.

Deddy menyatakan, keberadaan VHO ini juga menimbulkan per-

● ke halaman 15

PHRI Tak Punya Data Valid

● Sambungan Hal 9

saingan usaha yang tidak sehat, karena memasang harga yang tidak lagi sesuai. Dan menurut dia sudah berbentuk *aji mumpung*. Hal itu pun berdampak pada penurunan tamu hingga sebesar 5-10 persen kepada hotel.

"Kalau *low season* mereka

bisa pasang Rp90 ribu tapi kalau *high season* bisa sampai Rp1 juta an," kata Deddy, Senin (13/1).

Menurut dia, izin yang digunakan oleh VHO juga mesti dipertanyakan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi kalangan usaha lain.

Di lain sisi para anggota PHRI mesti mengurus perizinan secara ketat sementara VHO dianggap dapat beralih tanpa izin yang jelas.

"Jangan sampai rumah di kampung-kampung bisa langsung difungsikan tapi izinya bagaimana dan PAD kita menjadi berkurang dan yang dipersiapkan malah PHRI," kata dia.

Adapun untuk perpanjangan moratorium hotel, pihaknya tidak terlalu mempersoalkan kebijakan itu. Namun, dia menganggap bahwa aturan itu mesti terdapat celah sehingga pihaknya siap untuk mengawal. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005